

PERANAN KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP AGREGAT DEMAND DI INDONESIA TAHUN 2024

Putri Khairani^{1*}, Nita Rahmawati², Rangga Putra Nanda³, Yenni Samri Juliati Nasution⁴

Program Studi Akuntansi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

ranggaputrananda@gmail.com*

Abstrak

Dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pengeluaran pemerintah dan pajak, yang merupakan contoh kebijakan fiskal adalah fokus utama dari penelitian ini. Temuan-temuan menunjukkan bahwa insentif fiskal dan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi merupakan contoh kebijakan fiskal ekspansif yang secara efektif meningkatkan permintaan agregat, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat di Indonesia pada tahun 2024. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk artikel ilmiah dan dokumen resmi, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), undang-undang perpajakan, dan data ekonomi dari lembaga-lembaga terkait di Indonesia. Untuk menjaga harga-harga tetap stabil dan defisit anggaran nasional tetap terkendali, kebijakan fiskal haruslah seimbang. Mengatasi hambatan ekonomi lokal dan global pada tahun 2024 membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang dinamika kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap permintaan agregat, yang diberikan oleh studi ini.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal Agregat Demand Indonesia; Fiskal Moneter Ekonomi Indonesia; Agregat Demand Kebijakan Fiskal.

Abstract

The short-term and long-term impacts of government spending and taxes, which are examples of fiscal policy, are the main focus of this study. The findings suggest that fiscal incentives and higher government spending are examples of expansionary fiscal policies that effectively increase aggregate demand, leading to economic growth and lower unemployment. Using a qualitative research methodology, this study aims to analyze the impact of fiscal policy on aggregate demand in Indonesia in 2024. Information is collected from various sources, including scientific articles and official documents, including the State Budget (APBN), tax laws, and economic data from relevant institutions in Indonesia. To keep prices stable and the national budget deficit under control, fiscal policy must be balanced. Overcoming local and global economic headwinds in 2024 requires a thorough understanding of the dynamics of fiscal policy and its impact on aggregate demand, which this study provides.

Keywords: Fiscal Policy Aggregate Demand Indonesia; Fiscal Monetary Economy Indonesia; Aggregate Demand Fiscal Policy.

PENDAHULUAN

Semua permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian, baik dari rumah tangga, investor, pemerintah, maupun ekspor neto, digabungkan untuk membentuk permintaan agregat. Permintaan agregat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dalam dua cara: secara langsung dan tidak langsung. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, maka akan muncul peningkatan permintaan barang dan layanan jasa di pasar. Sebaliknya, kebijakan pengurangan pajak dapat menambah kemampuan beli masyarakat yang berdampak pada konsumsi rumah tangga (Azimi, A. 2021).

Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia berada dalam fase pemulihan ekonomi pascapandemi dan menghadapi tantangan global seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, fluktuasi harga energi dan pangan, serta dampak scarring effect dari krisis sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal tahun 2024 untuk menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Sari, dkk. 2024).

Mendukung daya beli masyarakat, mempercepat pemberantasan kemiskinan dan stunting, serta meningkatkan ketahanan pangan dan energi adalah beberapa tujuan dari pendekatan pemerintah yang lebih terukur terhadap belanja negara dan pendapatan negara dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal diposisikan tidak hanya sebagai alat penyeimbang keuangan negara, tetapi juga sebagai motor penggerak permintaan agregat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia (Oktaviani, 2022).

Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa metode kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang semakin kompleks dan dampak kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat pada tahun 2024. Dalam konteks strategi pembangunan nasional, studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kompleksitas interaksi antara pengeluaran pemerintah dan permintaan secara keseluruhan.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan akademik bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai peran strategis kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi, serta memberikan masukan bagi pengambil kebijakan tentang pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan tantangan ekonomi global.

METODE

Untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal (yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak) mempengaruhi permintaan agregat di Indonesia pada tahun 2024, studi kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mencapai hal tersebut. Data yang digunakan dalam studi ini berasal dari sumber sekunder, seperti publikasi pemerintah dan artikel ilmiah (Permata, dkk. 2024). Informasi yang dikumpulkan meliputi: Data kebijakan fiskal: mencakup data pengeluaran pemerintah dan data perpajakan dari APBN tahun 2024 dan data permintaan agregat: “mencakup konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor.” (Rantebua & Suriadi, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Studi Dokumentasi: “Peneliti mengumpulkan data dan informasi dari dokumen resmi seperti Laporan Keuangan Negara, APBN, statistik ekonomi dari BPS, dan laporan tahunan Bank Indonesia.” Kajian Literatur: Data dan teori pendukung dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi, dan artikel yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat berdasarkan data numerik. Penulis akan: Menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik, menganalisis tren dan perbandingan antara pengeluaran pemerintah, pajak, dan permintaan agregat, menarik kesimpulan berdasarkan pola hubungan dan implikasi kebijakan terhadap kondisi ekonomi Indonesia tahun 2024 (Mahlina et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di antara banyak alat yang digunakan untuk mengarahkan ekonomi negara, kebijakan fiskal menempati peringkat teratas. Untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, pemerintah sering kali menggunakan kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran yang dikenal sebagai kebijakan fiskal (Nabila et al., 2025). Pendapatan pemerintah biasanya berasal dari penerimaan pajak dan sumber lain, sedangkan pengeluaran pemerintah mencakup berbagai jenis belanja, baik untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga subsidi.

Dalam konteks perekonomian makro, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat strategis untuk mengatur aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan kondisi permintaan agregat dalam perekonomian melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan tingkat perpajakan (Mujasmara et al., 2023).

Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi adalah tiga tanggung jawab utama kebijakan fiskal. Barang dan jasa publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan jaring pengaman, merupakan fokus dari fungsi alokasi karena tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Dengan bantuan pengeluaran sosial dan sistem pajak progresif, fungsi distribusi membantu menurunkan ketimpangan pendapatan. Pada saat yang sama, upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatasi resesi dan inflasi, dua aspek dari siklus ekonomi yang dapat menggagalkan pertumbuhan, merupakan fungsi stabilisasi.

Pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak adalah dua alat utama yang digunakan untuk mencapai kebijakan fiskal. Untuk menstimulasi konsumsi dan investasi selama kemerosotan ekonomi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif, yang berarti memotong pajak atau meningkatkan pengeluaran (Lintang, 2021). Di sisi lain, inflasi dan panasnya perekonomian dapat dikendalikan dengan kebijakan fiskal kontraktif, yang berarti memotong pengeluaran atau meningkatkan pajak. Untuk menjaga ekonomi makro tetap seimbang, kebijakan fiskal adalah instrumen yang sangat penting.

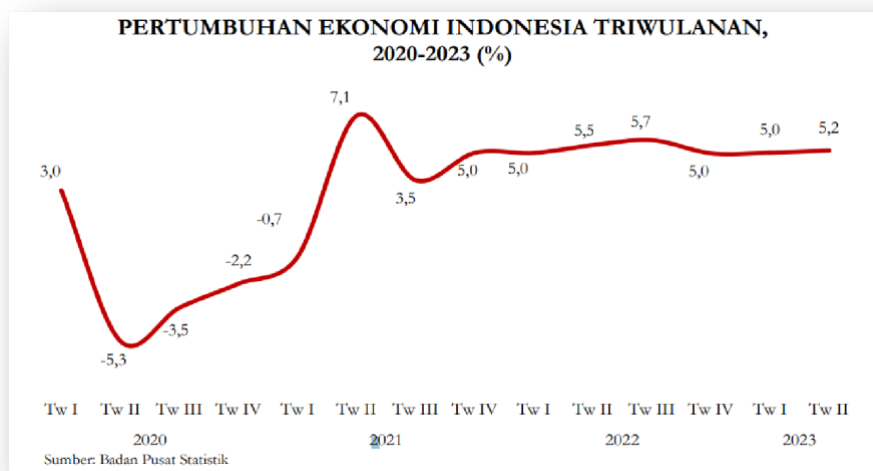
Istilah "permintaan agregat" mengacu pada jumlah semua komoditas dan layanan yang diinginkan oleh perekonomian secara keseluruhan pada titik harga dan periode waktu tertentu. Faktor-faktor seperti konsumsi swasta, investasi publik, ekspor neto, dan pengeluaran pemerintah membentuk sebagian besar permintaan agregat. Kebijakan pajak dan pengeluaran, yang berdampak pada pendapatan dan tingkat investasi masyarakat, adalah instrumen utama yang digunakan oleh kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi permintaan agregat (Norrahan, 2024).

Selama epidemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi selanjutnya, kebijakan fiskal di Indonesia sangat penting dalam mengatur dan meningkatkan permintaan agregat. Dalam upaya untuk menstimulasi pengeluaran dan memperkuat perekonomian, Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk peningkatan pengeluaran untuk program-program keamanan sosial, bantuan langsung tunai, dan investasi di bidang infrastruktur. Untuk menjaga agar bisnis tetap berjalan dan investasi swasta tetap tinggi, pemerintah juga menawarkan keringanan pajak dan program-program stimulus.

Kenaikan konsumsi dan investasi yang membantu pemulihan ekonomi Indonesia adalah bukti bagaimana kebijakan fiskal mampu mempengaruhi permintaan agregat. Namun, efek ini perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan hal-hal buruk seperti inflasi, utang pemerintah yang membengkak, dan defisit anggaran yang besar. Oleh karena itu, menjaga anggaran berimbang dan kemampuan pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara berkelanjutan harus tetap menjadi prioritas dalam pengelolaan kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan terkalibrasi dapat menjaga permintaan agregat pada tingkat yang sehat, mendorong pertumbuhan tanpa membuat perekonomian berantakan. Dampak kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat di Indonesia bergantung pada kemampuan pemerintah untuk melaksanakan reformasi struktural dan meningkatkan kualitas belanja negara, yang pada gilirannya akan menghasilkan efek pengganda yang positif bagi perekonomian melalui pemanfaatan dana negara (Handayani et al., 2025).

Tabel 1. dibawah ini adalah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia menurut Kementerian Keuangan



Sumber: www.kemenkeu.go.id

Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh wabah COVID-19. Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia menyusut sebesar 2,07 persen. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan aktivitas masyarakat, gangguan rantai pasok global, serta turunnya daya beli yang menyebabkan perlambatan di berbagai sektor usaha. Situasi ini memperlihatkan betapa rentannya ekonomi nasional terhadap krisis global yang bersifat mendadak dan menyeluruh. Namun, keadaan mulai membaik bagi perekonomian Indonesia sejak tahun 2021. Tahun berikutnya, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan menjadi 5,31% dari tahun sebelumnya sebesar 3,69%. Pada tahun 2023, tren kenaikan ini terus berlanjut, tumbuh dengan laju 5,05%. Untuk tahun 2024, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,03%, yang mencerminkan kondisi ekonomi yang semakin stabil dan terkendali. Peningkatan ekonomi ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari sejumlah inisiatif anggaran pemerintah, termasuk peningkatan pengeluaran untuk perawatan kesehatan dan infrastruktur dan pengenalan beberapa keringanan pajak untuk perusahaan. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan dipertahankan berkat kombinasi langkah-langkah ini, yang telah memulihkan daya beli masyarakat dan memperkuat aktivitas produksi.

Terdapat variasi yang mencolok dalam perkembangan ekonomi Indonesia dari kuartal pertama tahun 2020 hingga kuartal kedua tahun 2023. Pandemi COVID-19 berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, yang sangat parah terjadi pada kuartal kedua tahun 2020, yaitu sebesar -5,32%. Secara nasional, penurunan permintaan agregat, gangguan rantai pasokan, dan pembatasan kegiatan ekonomi semuanya berkontribusi terhadap penurunan ini. Namun, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat pada kuartal kedua 2021, ketika ekonomi tumbuh sebesar 7,1% sebagai hasil dari pelonggaran kebijakan mobilitas dan meningkatnya konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi menjadi lebih stabil selama tahun 2022 dan 2023, berada dalam kisaran 5%, yang menunjukkan adanya pemulihan yang konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 dari Kementerian Keuangan, kebijakan fiskal selama periode 2020–2024 berfokus pada pemulihan ekonomi melalui peningkatan belanja negara.

Dalam RAPBN 2024, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.304,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun dan Transfer ke Daerah serta Dana Desa sebesar Rp1.074,1 triliun. Strategi fiskal yang digunakan mencakup peningkatan investasi infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang, pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta pemberian insentif pajak dan subsidi guna mendukung sektor usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

Pendapatan negara juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode tersebut. Pada tahun 2022, penerimaan dalam negeri mencapai Rp2.630,1 triliun, mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi dan perbaikan sistem perpajakan. Proyeksi pendapatan negara pada tahun 2024 juga menunjukkan peningkatan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan reformasi di bidang penerimaan negara.(Adzam et al., 2024)

Sementara itu, defisit anggaran yang sempat membengkak pada masa pandemi juga berhasil ditekan secara bertahap. Pada tahun 2020, defisit anggaran mencapai Rp1.091,4 triliun atau 6,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, seiring dengan membaiknya penerimaan negara dan terkendalinya pengeluaran, defisit menurun menjadi Rp507,8 triliun atau setara 2,29% dari PDB pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Tabel 2. Pertumbuhan PDB Indonesia Triwulan 2020-2023



Sumber: www.bps.go.id

Langkah-langkah fiskal yang responsif, berhasil, dan berjangka panjang telah membantu perekonomian Indonesia pulih dari epidemi COVID-19. Pemerintah telah menerbitkan makalah yang menguraikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal untuk tahun 2024 sebagai upaya untuk memperkuat fondasi ekonomi ke depan dan mempertahankan sejumlah inisiatif pembangunan.

Sebagai bagian proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2024, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 dipresentasikan dan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 19 Mei 2023. "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif

dan Berkelanjutan" adalah topik utama dari naskah ini. Dalam mengembangkan topik ini, kami mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan prediksi kondisi ekonomi di masa depan, untuk memastikan agar tetap sejalan dengan tujuan program pembangunan nasional.

Setelah berhasil melewati masa pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan indikasi pemulihan yang kuat dan berjangka panjang. Indonesia mampu menjaga perekonomiannya tetap stabil dan membangun dasar yang kokoh bagi pertumbuhan nasional karena kebijakan fiskal yang responsif, efektif, dan fokus pada jangka panjang. Sebagai sumber utama untuk perencanaan keuangan negara dan strategi pembangunan, dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 disusun oleh pemerintah Indonesia. Sebagai bagian dari proses formal penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2024, makalah ini secara resmi disampaikan di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 19 Mei 2023. Dengan tujuan utama "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" sebagai topik utama di tahun 2024, KEMPPKF menunjukkan tekad pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan.

Pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan kualitas ekonomi yang konsisten merupakan ciri khas dari pemulihan ini. Sebagai contoh, pada awal tahun 2023, tingkat pengangguran sebesar 5,5%, turun dari 7,1% pada Agustus 2020. Sebagai hasil dari inisiatif sosial dan ekonomi pemerintah, tingkat kemiskinan yang mencapai dua digit (10,2%) selama pandemi-menurun menjadi 9,6% pada tahun 2022. Meskipun telah terjadi tekanan inflasi dunia yang memecahkan rekor selama 40 tahun terakhir, beberapa negara telah berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali. Tingkat inflasi tahunan telah menurun sejak April 2023, ketika dilaporkan sebesar 4,33%. Selain itu, setelah pemulihan substansial dari defisit 3,2% pada pertengahan 2013, situasi eksternal Indonesia menguat dengan surplus transaksi berjalan sebesar 1,0% dari PDB pada akhir 2022. Hal ini membuktikan bahwa strategi pemerintah dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam Indonesia telah berhasil meningkatkan ekspor sekaligus menyeimbangkan permintaan impor.

Melihat prospek ekonomi tahun 2024, pemerintah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus mengalami akselerasi meskipun berbagai risiko global masih membayangi. Terdapat empat risiko utama yang perlu diwaspadai: pertama, meningkatnya tensi geopolitik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional; kedua, pesatnya perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang menuntut adaptasi dalam dunia kerja dan industri; ketiga, tantangan perubahan iklim dan persaingan global dalam merespon isu ini; dan keempat, potensi munculnya kembali pandemi atau dampak jangka panjang dari pandemi sebelumnya yang dapat membatasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi global telah melambat, inflasi cukup tinggi, dan suku bunga acuan diproyeksikan akan tetap tinggi untuk waktu yang lama. Kebijakan ekonomi nasional harus fleksibel dan kuat untuk menghadapi situasi-situasi ini..(Manik et al., 2024)

Dalam menyusun RAPBN 2024, pemerintah telah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro berdasarkan indikator-indikator berikut ini, dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi:

Kisaran prediksi pertumbuhan ekonomi adalah 5,3% hingga 5,7%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp14.700 hingga Rp15.300 per dolar AS, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) bertenor 10 tahun sebesar 6,49-6,91%, harga minyak mentah Indonesia 75-85 dolar AS per barel, dan estimasi lifting minyak dan gas bumi harian masing-masing sebesar 597-652 KB dan 999-1.054 MB ekuivalen minyak.

Perubahan ekonomi yang lebih adil dan berjangka panjang merupakan tujuan dari kerangka kebijakan fiskal untuk tahun 2024. Alokasi, distribusi, dan stabilisasi adalah tiga tujuan utama APBN yang ingin dimaksimalkan oleh kebijakan ini. Untuk memfasilitasi pertumbuhan kegiatan yang bernilai ekonomi, fungsi alokasi membantu membangun infrastruktur yang lebih adil, meningkatkan SDM, memperkuat struktur kelembagaan dan peraturan, dan mempercepat pemrosesan sumber daya alam. Agar ekonomi dapat berkembang secara konsisten, fungsi stabilisasi berupaya untuk menjaga inflasi yang rendah dan daya beli yang tinggi. Prioritas nasional termasuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan stunting, dan fungsi distribusi bekerja untuk mencapai tujuan tersebut.

Penguatan reformasi fiskal secara menyeluruh menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Meningkatkan pendapatan negara merupakan prioritas utama pemerintah, bersamaan dengan menciptakan iklim ekonomi yang menguntungkan dan melindungi lingkungan. Berbagai upaya dilakukan untuk menyempurnakan sistem perpajakan, menjadikannya lebih adil dan efisien, serta memperluas basis penerimaan melalui perubahan-perubahan yang sedang berlangsung, terutama melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain itu, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan terus didorong melalui pendekatan inovatif pelayanan masyarakat dan pengelolaan aset negara yang lebih baik. (Nursawitri et al., 2025)

Dana pemerintah akan dialokasikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pengeluaran dalam jangka pendek termasuk menurunkan kemiskinan ekstrem, mengurangi stunting, menjaga inflasi tetap terkendali, dan meningkatkan investasi. Dalam jangka menengah, dana akan digunakan untuk reformasi sistemik termasuk meningkatkan kualitas SDM, membangun infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, dan pengetatan regulasi, dan lain-lain. Pemerintah juga akan berupaya untuk membuat program-program jaminan dan bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran dan efisien dengan meningkatkan akurasi data dan mendorong sinergi program. Untuk memastikan pelaksanaan tujuan pembangunan nasional yang paling efektif dan efisien, koordinasi strategi anggaran federal dan regional akan semakin ditingkatkan. Oleh karena itu, pada tahun 2024, belanja negara diproyeksikan turun antara 13,97% dan 15,01% dari PDB.

Defisit kurang dari tiga persen, atau antara dua hingga enam setengah persen dari produk domestik bruto (PDB), dianggap sebagai keseimbangan anggaran negara yang sehat. Selain itu, rasio utang negara terhadap PDB tetap berada dalam batas yang wajar, yaitu sekitar 38,07% hingga 38,97%. Keuangan yang inovatif, bijaksana, dan berjangka panjang adalah tujuan dari rencana anggaran 2024. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Special Mission Vehicles (SMV), dan Sovereign Wealth Funds (SWF) adalah beberapa mekanisme pendanaan yang didorong oleh pemerintah.

Stabilitas ekonomi nasional hanya dapat dicapai dengan kerja sama yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, dan penciptaan penyangga fiskal yang memadai dapat membantu dalam menghadapi kekhawatiran global. Selain mendorong skema pembiayaan yang inovatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pemerintah juga berkonsentrasi untuk mempercepat pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dengan menerapkan strategi anggaran ini, pemerintah berharap untuk melihat peningkatan dalam sejumlah indeks sosial dan ekonomi pada tahun 2024. Kami mengantisipasi penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,0% hingga 5,7% dan kisaran 6,5% hingga 7,5% untuk tingkat kemiskinan. Menurut proyeksi, indeks Gini untuk ketimpangan pendapatan akan naik dari 0,374 menjadi 0,377. Kisaran 73,99 hingga 74,02 juga diantisipasi untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator lain dari kesejahteraan pertanian dan perikanan yang lebih baik adalah peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 105-108 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 107-110.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berperan strategis dalam mengelola permintaan agregat dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, terutama di tengah tantangan global dan proses pemulihan pascapandemi. Pengeluaran pemerintah dan insentif perpajakan terbukti efektif dalam mendorong konsumsi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui RAPBN 2024 telah menunjukkan komitmen untuk menggunakan kebijakan fiskal secara berimbang dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan kualitatif yang digunakan kurang memungkinkan untuk mengukur dampak secara kuantitatif atau memberikan generalisasi yang luas. Kedua, data yang digunakan masih terbatas pada sumber sekunder dan periode waktu yang spesifik, yaitu tahun 2024, sehingga belum mencerminkan dinamika jangka panjang secara menyeluruh. Ketiga, belum terdapat eksplorasi mendalam terkait interaksi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dalam kerangka kebijakan makro yang lebih holistik.

Meskipun demikian, studi ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan permintaan agregat di Indonesia. Temuan ini dapat dijadikan referensi oleh akademisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum untuk memahami peran instrumen fiskal dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Azimi, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2020. *Jurnal Produktivitas*, 8(8), 108116.
- Adzam, M., Etania, A. R., & Alviyani, F. A. (2024). Pentingnya Kebijakan Fiskal dalam Aisyah, S., Suarmanayasa, N., Widiastuti, B. R., & Harsono, I. (2024). The Impact Of Fiscal Policy On Economic Growth : A Case Study Of Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 3773–3782.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2024. Jakarta: BPS.
- Handayani, E., Juanda, L., Fitrawaty, M., Simanjuntak, Y., & Efrain, T. (2025). *Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Pendekatan Kurva IS*. 2(1), 746–755.
- Irawan, E. (2023). Pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(3), 300–312.
- Kasus, E., Ekonomi, K., Alviandi, R., Talenta, E., Marbun, N., Reyna, L., & Sirait, A. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Pertumbuhan. *Research Accounting And Auditing Journal*, 1(1), 21–32.
- Krisnawati Silaban, K., Mnurung, M. P., Situmorang, R. M., Sinambela, R. A., & Silaban, P. S. M. J. (2024). Dampak kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat: Studi kasus di negara Indonesia.
- Lintang, V. A. (2021). Analisis Tata Kelola Keuangan Negara di Masa Covid 19. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(1), 310–319.
- Mahlina, C. W. M. K. S., Meylani, P. M. R., Sari, S. R. A. S. P., & Silaban, M. J. (2024). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Permintaan Agregat: Studi Kasus di Negara Indonesia.
- Manik, C. W., Silaban, K., Mnurung, M. P., Situmorang, R. M., Sinambela, R. A., & Silaban, Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 1–9.
<https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jka-widyakarya/article/view/2958/2664>
- Mujasmara, F. D., Tri, R., Panggabean, T., & Muliana, R. S. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Di Indonesia*, 3(6), 1–12. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APeran>
- Nursawitri, M. R., Sulistyaningsih, N., Nova, M. H., & Jannah, M. (2025). *Efektivitas Kebijakan Fiskal terhadap Permintaan Agregat dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Studi Literatur 2020-2024*. 5(2), 146–158.
- Nabila, N., Rizal, Y., Andiny, P., Fuad, M., & Safrizal, S. (2025). Dampak Belanja Pegawai , Belanja Barang , Belanja Modal dan Subsidi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia The Impact of Personnel Expenditure , Goods Expenditure , Capital Expenditure , and Subsidies on Tax Revenue Realization in Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 16(225), 692–706. <https://doi.org/10.33059/jseb.v16i3.12651>. Abstrak
- Norrahman, R. A. (2024). Analysis of the Impact of Fiscal Policy on Economic Growth in Indonesia. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(1), 17–25. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jsi>
- Oktaviani, N. R., & Mulyandani, V. C. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(2), 484-493.
- P. S. M. J. (2024). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Permintaan Agregat: Studi Kasus di Negara Indonesia. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 137–146. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1595>

- Pardamean, A. T. (2020). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. *Quantitative Economics Journal*, 2(3), 126–136.
<https://doi.org/10.24114/qej.v2i3.17434>
- Permata, D. A., Margiyana, H. M., Bani, L. S., & Noviarita, H. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8592-8602.
- Pratama, A. B., & Sari, N. P. (2023). Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 23(1), 45–59.
- Rahman, F., & Yusuf, M. (2022). Fiscal policy and aggregate demand: Evidence from Indonesia post-pandemic recovery. *Economic Journal of Emerging Markets*, 14(2), 150–162.
- Rantebua, S., Rosnawintang, R., & Suriadi, L. O. (2020). Analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5(1), 1-11.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1-10.
- Wulandari, D., Wijayanto, A., & Sari, F. (2024). Dampak kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro*, 12(2), 200–215.